

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi

Deva Angraini*, Fathiyah, Masnun

Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi

*Correspondence: devaanggraini4@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is aimed at knowing (1) The effect of government spending on the economy and public services on economic growth in Jambi Province. (2) Effect of government spending on public services on economic growth in Jambi Province. (3) The effect of government spending on the economy and public services simultaneously on economic growth in Jambi Province. The data used in this study are secondary data obtained from the official website of the Central Statistics Agency and the Directorate General of Fiscal Balance. The population used in this study were all regencies and cities in Jambi Province in 2014-2018, amounting to 55. This study used the Fixed Effect Model panel data regression analysis tool. The results showed that: (1) government spending in the economy had a significant effect on economic growth, indicated by the value of $1.766245 > t_{table} 1.29837$. (2) government spending on public services does not have a significant effect on economic growth, as indicated by the value of $t_{count} 0.952926 < t_{table} 1.29837$ (3) government spending on the economy and public services simultaneously influencing economic growth is indicated by the value of $F_{count} 12.86652 > F_{table} 3.18$. and the coefficient of determination ($Adj R^2$) 0.725.*

Keywords: *Government expenditure, economy, public services, economic growth*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sangat penting guna melihat keberhasilan Pembangunan pada suatu negara maupun daerah. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2017:9). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi cenderung mengalami peningkatan yang berfluktuasi rata-rata perkembangan sebesar 8.57 persen, akan tetapi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2018 lebih rendah atau menurun sebesar 4.71 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 sebesar 7.76 persen.

Pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu daerah terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah. perekonomian akan tumbuh dengan baik jika pemerintah menurunkan pajak atau menaikkan pengeluarannya (Mankiw, 2013:328).

Pengeluaran pemerintah yang dibahas pada penelitian ini hanya ditinjau dibidang ekonomi dan pelayanan umum. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi adalah belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan untuk sektor perhubungan, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal , ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum adalah belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah;pemerintahan umum; administrasi keuangan daerah;perangkat daerah; kepegawaian dan persandian, kepegawaian ,komonikasi dan informatika.

Pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi Provinsi Jambi mengalami penurunan yang berfluktuasi. Sedangkan pengeluaran pemerintah pada bidang pelayanan umum Provinsi Jambi mengalami juga mengalami penurunan yang berfluktuasi.

Hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003:257), kenaikan belanja pemerintah sebesar (ΔG) akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan

sebesar jumlah tersebut untuk semua tingkat pendapatan.

Landasan Teori

Pertumbuhan Ekonomi

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya (Jhingan, 2012:57). Salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal atau pembentukan modal, Negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat cenderung berinvestasi sangat besar dalam barang modal baru. Barang-barang modal disini mencakup struktur-struktur seperti jalan dan pembangkit tenaga listrik, peralatan seperti truk dan komputer, dan persediaan barang/ *stock of inventories* (Samuelson dan Nordhaus, 2001:251). Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini merupakan investasi pemerintah yang menjadi *social overhead capital* (SOC) yang sangat penting untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. *social overhead capital* (SOC) sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas umum atau publik. Tersedianya fasilitas umum atau publik oleh pemerintah maka akan menarik minat investor untuk menanamkan modal di daerah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan berarti peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara maupun daerah yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah maka peningkatan pajak berarti juga peningkatan pengeluaran pemerintah.

Menurut Keynes dalam buku Sukirno (2000:19), kegiatan perekonomian terutama tergantung kepada pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Pengeluaran agregat adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2006:24) yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel diruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional (Dumairy, 1996:157).

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. tahap awal perkembangan ekonomi, dimana investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Tahap menengah pembangunan ekonomi, peran pemerintah masih diperlukan tetapi peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peran pemerintah tetap besar karena peranan swasta yang semakin banyak ini menimbulkan kegagalan pasar dan pemerintah harus menyediakan barang publik dalam jumlah kualitas yang lebih baik. Pada tahap tingkat ekonomi lanjut, aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sedangkan Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah lebih

cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Di sisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak terus dinaikkan. teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GDP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Akibat besarnya pengeluaran pemerintah ini maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara (Mangkoesoebroto, 1994:169).

Pengeluaran pemerintah pada penelitian ini hanya ditinjau pada bidang ekonomi dan pelayanan umum. Belanja fungsi pelayanan umum adalah pengeluaran yang ditujukan dalam rangka peningkatan pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat maupun pihak swasta untuk pembayaran gaji, akses layanan atau perizinan, kemudahan informasi dan belanja operasional kebutuhan perkantoran sehari-hari. Belanja fungsi ekonomi adalah pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan sarana dan prasarana umum, serta memicu peningkatan perekonomian masyarakat. Pengeluaran ini ditujukan agar mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus mempunyai *multiplier effect*.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003:257), kenaikan belanja pemerintah sebesar (ΔG) akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah tersebut untuk semua tingkat pendapatan. Peningkatan tersebut berhasil mengubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti terjadi peningkatan pendapatan Y_1 ke Y_2 kenaikan pendapatan (ΔY) melebihi kenaikan belanja pemerintah (ΔG). Jadi kebijakan fiskal berupa belanja daerah atau pengeluaran pemerintah memiliki dampak pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan.

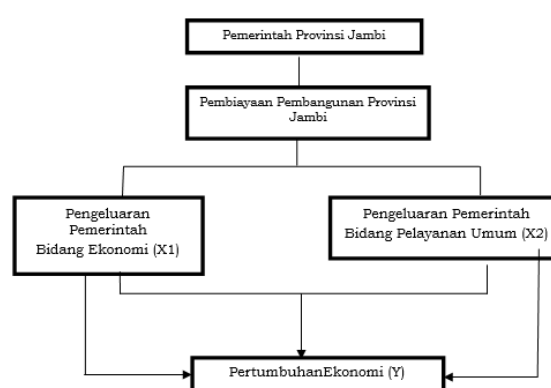
Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi merupakan investasi pemerintah karena pengeluaran pemerintah bidang ekonomi meliputi belanja untuk membangun fasilitas dan prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi, memberikan subsidi, beasiswa bantuan untuk korban bencana alam tidak digolongkan sebagai belanja pemerintah atas produk nasional karena belanja tersebut untuk membeli barang dan jasa (Sukirno, 2015:97).

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah pada bidang pelayanan umum adalah belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk menyediakan fasilitas umum atau publik karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan fasilitas umum atau publik untuk masyarakat maupun pihak swasta. Ketersediaan barang atau jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat atau swasta sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian (Subandi, 2014: 88).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Hipotesis

1. Diduga bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dan pelayanan umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga bahwa secara simultan pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dan

pelayanan umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi atau studi pustaka.

Alat Analisis

Analisis Regresi Linear Berganda Data Panel

Metode analisis data panel yaitu penggabungan data *time series* dengan *cross section* untuk mengetahui besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dan pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. sesuai dengan data panel dapat ditarik suatu model regresi sebagai berikut:

$$\log Y_{it} = \alpha + \beta_1 \log X_{1it} + \beta_2 \log X_{2t} + \varepsilon_{it}$$

$$\log PE_{it} = \alpha + \beta_1 \log PPBE + \beta_2 \log PPBPU + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

$\log PE_{it}$	= Pertumbuhan Ekonomi
α	= Konstanta atau intersep
β_1, β_2	= Parameter
$\log PPBE$	= Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
$\log PPBPU$	= Rasio Efektivitas PAD
ε_{it}	= Standar Error
i	= Urutan Kabupaten/Kota
t	= Series Tahun 2018-2022

Model Estimasi Data Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain adalah Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).

Pengujian Model Regresi Data Panel

1. Uji Chow

- H0 : Common Effect Model
H1 : Fixed Effect Model

Jika nilai probabilitas $F < \alpha = 0.05$ artinya H_0 ditolak H_1 diterima, maka model yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

Jika nilai probabilitas $F \geq 0.05$ artinya H_1 ditolak H_0 diterima, maka model yang digunakan adalah Common Effect Model.

2. Uji Hausman

H0 : Random Effect Model

H1 : Fixed Effect Model

Jika nilai probabilitas Chi-Square $< \alpha = 0.05$ artinya H_0 ditolak, maka model yang digunakan adalah Fixed Effect Model

Jika nilai probabilitas Chi-Square $> \alpha = 0.05$ artinya H_0 diterima, maka model yang digunakan adalah Random Effect Model.

Koefisien Determinasi (Adj R Square)

Koefisien determinasi (Adj R^2) Koefisien Determinasi (Adj R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel independen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi mendekati angka 1 maka akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel eksogenus secara simultan berpengaruh terhadap variabel endogenus. Langkah-langkah pengujiannya adalah jika $\text{sig} < 0,05$ maka H_a diterima, jika $\text{sig} > 0,05$ maka H_a ditolak.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujiannya menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 10% atau 0,1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Tabel 1. Hasil Uji Chow Untuk Memilih Antara Model CEM dengan FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PPBE?)	-0.001880	0.030125	-0.062412	0.9505
LOG(PPBPU?)	0.064671	0.028642	2.257919	0.0281

Sumber: Eviews 8.

Berdasarkan estimasi model Fixed Effect tersebut menunjukkan bahwa F

statistik dengan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < \alpha = 0.05$ persen sehingga H_0

ditolak, maka model yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

2. Uji Hausman

Tabel 2. Hasil Uji Hausman Untuk Memilih Antara Model FEM dengan REM

Variable	Coeffisient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	-0.307939	0.242657	-1.269031	0.2114
LOG(PPBE?)	0.046829	0.026514	1.766245	0.0846
LOG(PPBPU?)	0.028119	0.029508	0.952926	0.3461
Fixed Effects (Cross)				
_KERINCI--C	0.276038			
_MERANGIN--C	0.089448			
_SAROLANGUN--C	-0.201637			
_BATANGHARI--C	-0.043566			
_MUAROJAMBI--C	0.116644			
_TANJABTIM--C	-0.557403			
_TANJABBAR--C	-0.153141			
_TEBO--C	0.112543			
_BUNGO--C	0.014840			
_KOTAJAMBI--C	0.117789			
_SUNGAIPENUH--C	0.228446			
R-squared	0.786149	Mean dependent var		2.255480
Adjusted R-squared	0.725048	S.D. dependent var		0.949327
S.E. of regression	0.158492	Sum squared resid		1.055024
F-statistic	12.86652	Durbin-Watson stat		2.118729
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 8

Berdasarkan estimasi model Fixed Effect tersebut menunjukkan bahwa Chi-Square Statistik dengan nilai probabilitas sebesar $0.0264 < \alpha = 0.05$ sehingga H_0

ditolak, maka model yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

Hasil Persamaan Regresi Data Panel Fixed Effect Model

Tabel 3. Hasil Regresi dengan Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.307939	0.242657	-1.269031	0.2114
LN_PPBE?	0.046829	0.026514	1.766245	0.0846***
LN_PPBPU?	0.028119	0.029508	0.952926	0.3461***
Fixed Effects (Cross)				
_KERINCI—C	0.276038			
_MERANGIN—C	0.089448			
_SAROLANGUN—C	-0.201637			
_BATANGHARI—C	-0.043566			
_MUAROJAMBI—C	0.116644			
_TANJABTIM—C	-0.557403			
_TANJABBAR—C	-0.153141			
_TEBO—C	0.112543			
_BUNGO—C	0.014840			
_KOTAJAMBI—C	0.117789			
_SUNGAIPENUH—C	0.228446			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.786149	Mean dependent var		2.255480
Adjusted R-squared	0.725048	S.D. dependent var		0.949327
S.E. of regression	0.158492	Sum squared resid		1.055024
F-statistic	12.86652	Durbin-Watson stat		2.118729
Prob(F-statistic)	0.000000			

Unweighted Statistics			
R-squared	0.764842	Mean dependent var	1.663755
Sum squared resid	1.113795	Durbin-Watson stat	2.057426

Sumber: Eviews 8

Keterangan:

* : $\alpha = 1\%$ (0.01)

** : $\alpha = 5\%$ (0.05)

*** : $\alpha = 10\%$ (0.1)

$$\log PE_{it} = -0.307939 + 0.046829 \log PPBE_{it} + 0.028119 \log PPBPU_{it}$$

Berdasarkan hasil estimasi regresi menggunakan model Fixed Effect menunjukkan bahwa angka konstanta atau intersep adalah sebesar -0.307939 . Angka ini menunjukkan apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tidak mengalami perubahan, maka pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 0.307939 .

Nilai koefisien pengeluaran pemerintah bidang ekonomi sebesar 0.046829 . Angka ini menunjukkan apabila pengeluaran pemerintah meningkat sebesar satu rupiah maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0.046829 dengan asumsi pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tidak mengalami perubahan.

Nilai koefisien pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum sebesar 0.028119 . Angka ini menunjukkan apabila pengeluaran pemerintah meningkat sebesar satu rupiah maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0.028119 dengan asumsi pengeluaran pemerintah bidang ekonomi tidak mengalami perubahan.

Intersep Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil estimasi model Fixed Effect pada tabel 4.6 dapat juga diketahui nilai konstanta atau nilai individual effect untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam persamaan regresi yang diurut berdasarkan nilai konstanta tertinggi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} _KERINCI_{it} &= \alpha + \beta_1 \log PPBE_{it} + \beta_2 \log PPBPU_{it} \\ &= 0.276038 + 0.046829 \log PPBE_{it} + 0.028119 \log PPBPU_{it} \end{aligned}$$

Kabupaten Kerinci memiliki nilai konstanta atau intersep sebesar 0.276038 yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan

umum tetap, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci sebesar 0.276038 .

$$\begin{aligned} _SUNGAIPENUH_{it} &= \alpha + \beta_1 \log PPBE_{it} + \beta_2 \log PPBPU_{it} \\ &= 0.228446 + 0.046829 \log PPBE_{it} + 0.028119 \log PPBPU_{it} \end{aligned}$$

Kota Sungai Penuh memiliki nilai konstanta atau intersep sebesar 0.228446 yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tetap, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci sebesar 0.228446 .

$$\begin{aligned} _KOTAJAMBI_{it} &= \alpha + \beta_1 \log PPBE_{it} + \beta_2 \log PPBPU_{it} \\ &= 0.117789 + 0.046829 \log PPBE_{it} + 0.028119 \log PPBPU_{it} \end{aligned}$$

Kota Jambi memiliki nilai konstanta atau intersep sebesar 0.117789 yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tetap, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci sebesar 0.117789 .

$$\begin{aligned} _MUAROJAMBI_{it} &= \alpha + \beta_1 \log PPBE_{it} + \beta_2 \log PPBPU_{it} \\ &= 0.116644 + 0.046829 \log PPBE_{it} + 0.028119 \log PPBPU_{it} \end{aligned}$$

Kabupaten Muaro Jambi memiliki nilai konstanta atau intersep sebesar 0.117789 yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tetap, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi sebesar 0.117789 .

$$\begin{aligned} _TEBO_{it} &= \alpha + \beta_1 \log PPBE_{it} + \beta_2 \log PPBPU_{it} \\ &= 0.112543 + 0.046829 \log PPBE_{it} + 0.028119 \log PPBPU_{it} \end{aligned}$$

Kabupaten Tebo memiliki nilai konstanta atau intersep sebesar 0.112543 yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tetap, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo sebesar 0.228446 .

$$\begin{aligned} _MERANGIN_{it} &= \alpha + \beta_1 \log PPBE_{it} + \beta_2 \log PPBPU_{it} \\ &= 0.089448 + 0.046829 \log PPBE_{it} + 0.028119 \log PPBPU_{it} \end{aligned}$$

Kabupaten Merangin memiliki nilai konstanta atau intersep sebesar 0.089448 yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tetap, maka pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Merangin sebesar 0.089448.

$$\begin{aligned} _BUNGO_{it} &= \alpha + \beta_1 \log PPBE_{it} + \beta_2 \log PPBPU_{it} \\ &= 0.014840 + 0.046829 \log PPBE_{it} + 0.028119 \log PPBPU_{it} \end{aligned}$$

Kabupaten Bungo memiliki nilai konstanta atau intersep sebesar 0.014840 yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tetap, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 0.014840.

$$\begin{aligned} _TANJABTIM_{it} &= \alpha + \beta_1 \log PPBE_{it} + \beta_2 \log PPBPU_{it} \\ &= -0.557403 + 0.046829 \log PPBE_{it} + 0.028119 \log PPBPU_{it} \end{aligned}$$

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki nilai konstanta atau intersep sebesar -0.557403 yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tetap, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar -0.557403.

$$\begin{aligned} _SAROLANGUN_{it} &= \alpha + \beta_1 \log PPBE_{it} + \beta_2 \log PPBPU_{it} \\ &= -0.201637 + 0.046829 \log PPBE_{it} + 0.028119 \log PPBPU_{it} \end{aligned}$$

Kabupaten Sarolangun memiliki nilai konstanta atau intersep sebesar -0.201637 yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tetap, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun sebesar -0.201637.

$$\begin{aligned} _TANJABBAR_{it} &= \alpha + \beta_1 \log PPBE_{it} + \beta_2 \log PPBPU_{it} \\ &= -0.153141 + 0.046829 \log PPBE_{it} + 0.028119 \log PPBPU_{it} \end{aligned}$$

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki nilai konstanta atau intersep sebesar -0.153141 yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tetap, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar -0.153141.

$$\begin{aligned} _BATANGHARI_{it} &= \alpha + \beta_1 \log PPBE_{it} + \beta_2 \log PPBPU_{it} \\ &= -0.043566 + 0.046829 \log PPBE_{it} + 0.028119 \log PPBPU_{it} \end{aligned}$$

Kabupaten Batanghari memiliki nilai konstanta atau intersep sebesar -0.043566 yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tetap, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar -0.043566.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan estimasi model Fixed Effect koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0.725048 hal ini berarti bahwa kontribusi variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 72.50 persen. Sisanya sebesar 27.5 dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pengujian Hipotesis

1. Uji F-Statistik (Uji Simultan)

Nilai F_{tabel} ditentukan dari $df = n-k-1$ ($55-3-1$) = 51 dengan $\alpha = 0.05$ diperoleh nilai $F_{tabel} = 3.18$. Berdasarkan estimasi model Fixed Effect diperoleh nilai (F -statistic) sebesar 12.86652 apabila dibandingkan dengan F_{tabel} maka nilai F_{hitung} (F -statistic). Maka nilai F hitung (F -statistic) $> F_{tabel}$ ($12.86652 > 3.18$) atau signifikansi nilai probabilitas (F -statistic) lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ ($0.000000 < 0.05$) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang dimaknai bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

2. Uji t-Statistik (Uji Parsial)

Nilai t_{tabel} ditentukan dari $df = n-k-1$ ($55-3-1$) = 51 dengan $\alpha = 0.05$ diperoleh nilai $t_{tabel} = 1.29837$. Berdasarkan estimasi model Fixed Effect diketahui nilai t -statistic variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi sebesar 1.766245. Angka ini apabila dibandingkan dengan t_{tabel} maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1.766245 > 1.29837$) atau nilai signifikansi probabilitas statistic lebih kecil dari $\alpha = 0.1$ ($0.0846 < 0.1$) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum

Berdasarkan hasil estimasi model Fixed Effect menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum tidak seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dimana nilai koefisien pengeluaran pemerintah bidang ekonomi sebesar 0.046829 dan nilai koefisien pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum sebesar 0.028119 bernilai positif atau

meningkat sedangkan nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -0.307939 bernilai negatif atau menurun. Artinya peningkatan pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori Hukum Wagner yang menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Zahari, M. (2017) yang menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan ekonomi daerah mempunyai efek positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Negatifnya dampak pengeluaran pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Hal ini diasumsikan bahwa anggaran belanja yang di alokasikan untuk pembangunan tidak dinikmati manfaatnya secara langsung oleh sebagian masyarakat atau hanya dinikmati oleh sebagian besar kalangan pengusaha besar yang menguasai sektor ekonomi seperti sawit dan pertambangan. Hasil sawit dan pertambangan ini diolah dalam negeri dan dinikmati luar negeri. Sehingga pembangunan atau fasilitas publik seperti jalan jembatan yang dibangun pemerintah menjadi hancur karena dilewati oleh transportasi sawit dan batu bara akibatnya fasilitas umum yang disediakan pemerintah seperti jalan tidak bisa dinikmati oleh sebagian masyarakat, sehingga kegiatan perekonomian tidak berjalan lancar dan terhambat.

SIMPULAN

Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum menurunkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

Saran

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah perlu menyusun strategi pembangunan dan alokasi belanja pelayanan umum untuk menyediakan fasilitas publik lebih terarah dan tepat sasaran agar membantu melancarkan kegiatan perekonomian masyarakat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tri Basuki dan Prawoto, Nano. 2017. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Data keuangan daerah mulai 2006*.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. N. 2015. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mangokoesobroto, Guritno. 1994. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw. N. Gregory. 2003. *Teori makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw. N. Gregory. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw. N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw. N. Gregory. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Samuelson, Paul A. Dan William, D Nordhaus. 2001. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta : PT. Media Edukasi.
- Subandi, MM. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Subandi, MM. 2014. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.